

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari segi perkembangannya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan kultur demokratis warga negaranya. Demokrasi merupakan sistem yang dipahami dengan berbagai imajinasi beserta kebaikannya, kehadiran demokrasi dipandang sebagai jalan yang akan membawa masyarakat pada kondisi yang lebih baik (Sukri, 2016:152). Menurut Hamdi dkk (2019:102), dalam sistem demokrasi rakyat diberi kedaulatan serta kehendak dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi serta pikiran pikirannya dalam proses bernegara dan berbangsa. Zyngier (2012:3) menjelaskan mengenai demokrasi sebagai berikut:

Democracy must be constantly cultivated, conceptualized and re-worked, with less dependence on the formal political process and cycle of elections, and more on critical engagement in developing the conditions for emancipation, enhanced power relations, and epistemological discovery that may lead to some of the virtues that are commonly extolled when discussing democracy (freedom, liberty, rights, common virtues, etc).

Pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia berlandaskan atas nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebuah konsep yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan beserta permasalahan bangsa dan negara (Mulyono dan Fatoni, 2019:98). Ciri khas demokrasi Indonesia terletak pada sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat Pancasila tersebut, menjadi aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang ditujukan dalam pengamalan nilai-nilai demokrasi.

Pembentukan nilai-nilai demokrasi salah satunya melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti sekolah, merupakan tempat pengamalan nilai-nilai demokrasi. Sekolah bagian dari lembaga pendidikan, merupakan wadah dalam membentuk dan menumbuhkan potensi peserta didik agar menguasai nilai-

nilai demokrasi. Penanaman nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah bertujuan memberikan bekal peserta didik mengenai sikap demokratis, bertanggung jawab dan menghargai antar sesama. Pendidikan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa perlu untuk melakukan sebuah pengembangan. Pengembangan pendidikan tersebut salah satunya melalui penyempurnaan kurikulum 2013.

Partisipasi dan pengembangan warga negara dalam dunia pendidikan merupakan cerminan karakter bangsa Indonesia yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada dunia pendidikan untuk mengarahkan dan mewujudkan siswa menjadi bagian warga negara yang demokratis. Perwujudan nilai-nilai demokrasi tersebut, salah satunya melalui lembaga pendidikan. Menurut Zamroni dalam Hamdi dkk (2019:102-103):

Pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang “demokratis”. Tanpa manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan menjadi impian belaka. Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran serta keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratislah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan.

Nilai demokrasi yang dapat kita lihat dalam lingkungan sekolah adalah kebebasan peserta didik dalam memilih dan mengungkapkan pendapat. Prinsip tersebut harus menjadi bagian dari karakter peserta didik. Memanusiakan manusia harus dilakukan di lingkungan sekolah, sebagai manifestasi budaya demokrasi. Pengamalan nilai-nilai demokrasi tersebut, harus ditanamkan pada peserta didik yang dibentuk melalui dunia pendidikan. Guru sangat berperan dalam membentuk dan membimbing peserta didik sebagai bagian warga negara yang demokratis.

Era globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat, menjadikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*civic education*) sangat penting, agar peserta didik tidak mengalami *split personality* (Rahayu, 2017:6). Berbagai macam ideologi dan gaya hidup telah masuk dalam jantung kehidupan bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal yang mempengaruhi cara berpikir generasi muda, menghambat tumbuhnya nilai kepribadian dan struktur kenegaraan yang telah menjadi konsensus nasional (Rahayu, 2017:6). Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan memiliki kontribusi positif dalam menumbuhkan kesadaran bernegara, sebagai wujud sikap dan perilaku cinta tanah air.

Andil besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terlihat dalam sila kerakyataan yang mencantumkan nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Prinsip demokrasi tersebut sesuai dengan Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Mendukung kebebasan yang disertai dengan rasa tanggung jawab sebagai contoh pengamalan nilai-nilai demokrasi Indonesia. Nilai baik tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama, khususnya bagi peserta didik yang menempuh dan menimba ilmu dalam dunia pendidikan. Menurut Westbrook sebagaimana dikutip Klemenovic dan Zukovic (2013:466):

The Values of the democratic community can be most efficiently developed and adopted in the school context, if school is enabled to function as a live and actual social institution where pupils learn from their own life experience through acting in the community of mutually different peers and resolving actual or real life problems.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Implementasi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku peserta didik (Rahayu, 2017:1). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejatinya studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia (Rahayu, 2017:1).

Dasar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diajarkan di sekolah hingga perguruan tinggi adalah Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Rahayu, 2017:1). Nurdin (2017:70) menambahkan mengenai dasar hukum PPKn sebagai berikut:

To strengthen of Civic Education in Indonesia, government has issued several policies for the implementation of Civic Education in schools and universities. The formal legal foundation of Civic Education in Indonesia includes regulation No. 20/2003 on the National Education System and Regulation No. 12/2012 on Higher Education: Clause 35, article, article (2) of regulation No. 20/2003 on National Education System jo., clause 35,

article (3) of regulation No. 12/2012 on Higher Education states that the curricula of higher education should include "Civic Education."

Penanaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan (*civic values*) melalui pendidikan semakin penting dalam masa menuju demokrasi yang sedang terjadi di negara Indonesia. Upaya strategis penanaman nilai-nilai demokrasi ialah melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*civic education*) yang di dalamnya mengandung upaya sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep kewarganegaraan di tengah transisi politik menuju demokrasi (Rahayu, 2017:6). Titik urgensi ini terletak pada harapan terhadap generasi muda yang tumbuh dan berkembang melalui dunia pendidikan, hal ini sesuai dengan pendapat Nurdin (2017:70) bahwa:

Civic Education is an education of topics covering Pancasila, the 1945 constitution of Indonesia, the Republic of Indonesia, and the concept of Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity), and to shape the Students into Citizens who possess nationalism and patriotism.

Membangun kecerdasan demokrasi bagi peserta didik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi hal yang krusial. Pengajaran demokrasi tersebut, sebagai upaya membentuk perilaku siswa yang partisipatif, sebagai wujud hubungan warganegara dengan negaranya. Prinsip demokrasi bila tidak diimbangi dengan kecerdasan literasi dan pengetahuan akan menimbulkan penyalahgunaan kebebasan. Penanaman kecerdasan demokrasi tersebut, akan menjadi bekal bagi peserta didik nantinya, sebagai generasi penerus bangsa.

Penelitian ini dapat menjadi dasar dan bisa dikembangkan lagi oleh mahasiswa lain Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Keterkaitan tersebut tertuang dalam visi dan misi Program Studi PPKn FKIP UMS sebagai berikut:

Visi Program Studi:

Tahun 2029 menjadi program studi yang menghasilkan tenaga pendidik PPKn dan ekstrakurikuler yang berkepribadian islam dan memberi arah perubahan.

Misi Program Studi:

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang cerdas, kompeten, andal, pembaharuan, dan berkepribadian islami.

2. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn dan ekstrakurikuler.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang PPKn dan ekstrakurikuler.
4. Menjalani kemitraan untuk meningkatkan mutu program studi (<http://ppkn.ums.ac.id/>).

Keterkaitan yang lain adalah adanya mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi yang selaras dengan penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Indonesia dengan Menggunakan Strategi *Mind Mapping* kombinasi Media Audio Visual pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2020/2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi Media Audio Visual dapat meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021?
3. Apa sajakah kendala penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021?
4. Bagaimanakah solusi alternatif untuk mengatasi kendala penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual sebagai sarana peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021.
2. Mendeskripsikan efektivitas penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021.
3. Mengkaji kendala penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021.
4. Menemukan solusi alternatif untuk mengatasi kendala penggunaan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia pada siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2020/2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapatkan teori baru terkait peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 - b. Menambah wawasan dan persepsi tentang peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan strategi *Mind Mapping*

kombinasi media Audio Visual dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada siswa kelas VIII-F SMP 1 Negeri Karanganyar.

c. Hasil kajian ini dapat dijadikan dasar bagi kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi siswa

- 1) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Demokrasi Indonesia.
- 2) Siswa dapat memperoleh pengalaman langsung yang menyenangkan sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan.

b. Manfaat bagi peneliti

- 1) Menumbuhkan semangat peneliti untuk meningkatkan pemahaman siswa dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran.
- 2) Menambah wawasan mengenai pengaruh penggunaan strategi dan media pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman siswa terkait nilai-nilai Demokrasi Indonesia.
- 3) Mengembangkan keterampilan bagi peneliti dalam menyampaikan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia

c. Manfaat bagi pembaca

- 1) Memberikan masukan dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia.
- 2) Memberikan informasi mengenai peningkatan pemahaman nilai-nilai Demokrasi Indonesia dengan menggunakan strategi *Mind Mapping* kombinasi media Audio Visual.